



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim Domestik**  
**Amerika Serikat dan Tiongkok**

Skripsi

Oleh

Lienny Amanda

6091801250

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim Domestik**

**Amerika Serikat dan Tiongkok**

Skripsi

Oleh

Lienny Amanda

6091801250

Pembimbing

Vrameswari Omega Wati, S.I.P., M.Si (Han)

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Lienny Amanda  
Nomor Pokok : 6091801250  
Judul : Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim  
Domestik Amerika Serikat dan Tiongkok

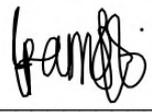
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Selasa, 21 Juni 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

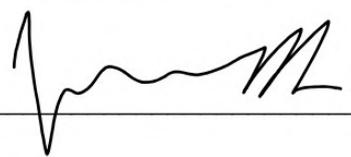
**Ketua sidang merangkap anggota**

Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.I.P., M.Sc : 

**Sekretaris**

Vrameswari Omega Wati, S.I.P., M.Si (Han) : 

**Anggota**

Adrianus Harsawaskita, S.I.P., M.A. : 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lienny Amanda

NPM : 6091801250

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim  
Domestik Amerika Serikat dan Tiongkok

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 8 Juni 2022



Lienny Amanda

6091801250

## Abstrak

Name : Lienny Amanda  
NPM : 6091801250  
Judul : Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim  
Domestik Amerika Serikat dan Tiongkok

---

Sebagai kedua negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, penanganan perubahan iklim kedua negara merupakan kunci dari kesuksesan atau kegagalan global dalam penanganan perubahan iklim. Namun, nyatanya ditemukan perbedaan pandangan diantara aktor keamanan dalam menjalankan agenda keamanan perubahan iklim di kedua negara. Hal ini menghasilkan sebuah pertanyaan penelitian “Bagaimana Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim Domestik Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2014 hingga tahun 2016?”. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif serta keamanan lingkungan dari Mazhab Kopenhagen sebagai konsep. Konsep keamanan lingkungan terdiri dari empat elemen utama yaitu *security agenda*, *security actor*, *logic of threats and vulnerabilities*, serta *referent object*. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *qualitative documents* dan *qualitative audio*, ditemui bahwa perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam agenda perubahan iklim Amerika Serikat, ditemukan adanya perdebatan antara aktor saintifik dan publik dengan pemerintah selaku aktor politik. Perdebatan dilandaskan atas keraguan publik dan aktor saintifik terhadap komitmen pemerintah dalam memprioritaskan isu perubahan iklim. Lebih lanjut, perdebatan juga ditemui di antara aktor politik Tiongkok yaitu antara publik dengan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena terdapat batasan bagi aktor keamanan selain pemerintah untuk terlibat dalam pembentukan agenda keamanan perubahan iklim di Tiongkok.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat, Tiongkok, perubahan iklim, agenda keamanan, ancaman eksistensial, aktor saintifik, aktor politik

## Abstract

Name : Lienny Amanda  
Student ID : 6091801250  
Title : Formation of United States' and China' Climate  
Change Security Agenda

---

*As the biggest greenhouse gas emitter, the U.S's and China's climate management could be the key to global success or failure in tackling climate change. Nevertheless, a disagreement arose from the U.S's and China's climate actors concerning how to run climate change agenda as a security issue. Hence, this thesis aims to answer the question of, "How's the formation of the United States's and China's Domestic Security Agenda on Climate Change from 2014 to 2016?". This thesis uses qualitative research methods and environmental security from Copenhagen School as a concept to answer the question. The concept consists of four sub concepts, namely, security agenda, security actor, logic of threats and vulnerabilities, and referent object. By using qualitative documents and audio as data collection techniques, it is found that climate change is an existential threat to the United States and China. In the U.S's climate change debate, disagreement emerged between scientific actors and the public towards the government as political actors. Scientific actors and the public cast doubt on the government's commitment to prioritize climate change as a security issue. Furthermore, a climate change debate appears in China. This happens because the Chinese government seems to draw limitations towards the public and scientific actors' involvement in framing climate change security agenda.*

***Key Words: United States, China, climate change, security agenda, existential threat, scientific actors, political actors***

## **Kata Pengantar**

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu global dengan tantangan terbesar di abad ini. Besar dan luasnya ancaman serta kompleksitas untuk mengelola isu perubahan iklim menjadi beberapa alasannya. Sebagai kedua negara yang berkontribusi banyak atas terciptanya isu, Amerika Serikat dan Tiongkok mendapatkan tuntutan dari beberapa aktor internasional untuk menanggulangi isu. Hal ini menjadikan agenda keamanan perubahan iklim kedua negara sebagai salah satu patokan pengamat internasional untuk mengukur kesuksesan global dalam menanggulangi isu. Sebagai bagian dari masyarakat global yang terancam, penulis memiliki harapan agar Amerika Serikat, Tiongkok, dan aktor internasional lainnya untuk dapat mengambil peran dalam menanggapi isu perubahan iklim sebagaimana ancaman dan urgensi yang didatangkan oleh isu.

Saya berharap agar pembaca mampu mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Disisi lain, saya juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini. Dengan begitu, saya terbuka dengan adanya kritik dan saran terhadap penelitian ini.

Bandung, 8 Juni 2022

Lienny Amanda

## Daftar Isi

<b>Abstrak</b>	<b>i</b>
<b>Abstract</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Literatur	9
1.5 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1 Metode Penelitian	20
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	21
1.7 Sistematika Pembahasan	21
<b>BAB II</b>	<b>23</b>
<b>Isu Perubahan Iklim sebagai Ancaman Eksistensial</b>	<b>23</b>
2.1 Kondisi dan Dampak Perubahan Iklim di Amerika Serikat	24
2.1.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Air di Amerika Serikat	27
2.1.2 Dampak Perubahan Iklim terhadap Energi di Amerika Serikat	28
2.1.3 Dampak Perubahan Iklim terhadap Lahan dan Hutan di Amerika Serikat	30
2.1.4 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati di Amerika Serikat	30

2.1.5 Dampak Perubahan Iklim terhadap Pantai dan Laut di Amerika Serikat	31
2.1.6 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kualitas Udara di Amerika Serikat	32
2.1.7 Dampak Perubahan Iklim terhadap Agrikultur dan Masyarakat Pedesaan di Amerika Serikat	32
2.1.8 Dampak Perubahan Iklim terhadap Transportasi di Amerika Serikat	33
2.1.9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Masyarakat di Amerika Serikat	35
<b>2.2 Isu Perubahan Iklim sebagai Ancaman Eksistensial di Amerika Serikat</b>	<b>36</b>
<b>2.3 Kondisi dan Dampak Perubahan Iklim di Tiongkok</b>	<b>40</b>
2.3.1 Dampak Perubahan Iklim terhadap Air di Tiongkok	41
2.3.2 Dampak Perubahan Iklim terhadap Energi di Tiongkok	42
2.3.3 Dampak Perubahan Iklim terhadap Lahan dan Hutan di Tiongkok	43
2.3.4 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati di Tiongkok	43
2.3.5 Dampak Perubahan Iklim terhadap Pantai dan Laut di Tiongkok	44
2.3.6 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kualitas Udara di Tiongkok	44
2.3.7 Dampak Perubahan Iklim terhadap Agrikultur di Tiongkok	45
2.3.8 Dampak Perubahan Iklim terhadap Transportasi di Tiongkok	46
2.3.9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Masyarakat di Tiongkok	47
<b>2.4 Isu Perubahan Iklim sebagai Ancaman Eksistensial di Tiongkok</b>	<b>47</b>
2.5 Tanggung Jawab Khusus Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Menangani Isu Perubahan Iklim	50
<b>BAB III</b>	<b>52</b>
<b>Pembentukan Agenda Keamanan</b>	<b>52</b>
<b>Perubahan Iklim di Amerika Serikat dan di Tiongkok</b>	<b>52</b>
<b>3.1 Pembentukan Agenda Keamanan dalam Menanggapi Perubahan Iklim di Amerika Serikat</b>	<b>53</b>
3.1.1 Pembentukan Agenda Saintifik Perubahan Iklim di Amerika Serikat	53
3.1.2 Pembentukan Agenda Politik Perubahan Iklim di Amerika Serikat	59
3.1.3 Perdebatan dalam Agenda Keamanan Perubahan Iklim di Amerika Serikat	71
<b>3.2 Pembentukan Agenda Keamanan dalam Menanggapi Perubahan Iklim di Tiongkok</b>	<b>78</b>

3.2.1 Pembentukan Agenda Saintifik Perubahan Iklim di Tiongkok	78
3.2.2 Pembentukan Agenda Politik Perubahan Iklim di Tiongkok	83
3.2.3 Perdebatan dalam Agenda Keamanan Perubahan Iklim di Tiongkok	98
3.3 Peran Amerika Serikat dan Tiongkok dalam Menangani Perubahan Iklim sebagai Isu Keamanan	101
<b>BAB IV</b>	<b>104</b>
<b>Kesimpulan</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>108</b>

## Daftar Tabel

<b>BAB II</b>	<b>23</b>
Tabel 2.1 (Emisi Gas di Amerika Serikat berdasarkan Jenis Gas pada tahun 2014-2019)	24
Tabel 2.2 (Emisi Gas di Amerika Serikat berdasarkan Sektor Ekonomi pada tahun 2014-2020)	24

## Daftar Gambar

<b>BAB II</b>	<b>23</b>
Gambar 2.1 (Rata-rata suhu lingkungan di Amerika Serikat pada tahun 1901 hingga 2020)	26
Gambar 2.2 (Perbandingan Frekuensi Banjir di Pesisir Laut Amerika Serikat pada periode tahun 1950-1959 dengan periode tahun 2011-2020)	34
Gambar 2.3 (Estimasi Emisi gas di Tiongkok pada tahun 1990-2019 berdasarkan Jenis Gas)	40
Gambar 2.4 (Kecenderungan Kenaikan Permukaan Air di Pesisir Laut Tiongkok pada tahun 1980-2016)	44
Gambar 2.5 (10 Kota dengan Level Polusi Udara Terburuk di Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2014)	45
Gambar 2.6 (Lima daerah di Tiongkok yang termasuk sebagai Infrastructure Critically Hotspots)	49
<b>BAB III</b>	<b>52</b>
Gambar 3.1 (Badan Pemerintah Pengambil Keputusan terkait Perubahan Iklim di Tiongkok)	84

## Daftar Singkatan

BSER	<i>Best System of Emission Reduction</i>
CPP	<i>Clean Power Plan</i>
CPC	<i>Community Party of China</i>
CCF	<i>China Carbon Forum</i>
CYCAN	<i>China Youth Climate Action of Network</i>
CRAES	<i>Chinese Research Academy of Environmental Sciences</i>
DOC	<i>Department of Commerce</i>
DOD	<i>Department of Defense</i>
DOE	<i>Department of Energy</i>
DOI	<i>Department of Interior</i>
DOS	<i>Department of State</i>
DOT	<i>Department of Transportation</i>
EDF	<i>Environmental Defense Fund</i>
EPA	<i>Environmental Protection Agency</i>
EE	<i>The Institute of Earth Environment</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
HHS	<i>Department of Health &amp; Human Services</i>
NDCs	<i>Nationally Determined Contributions</i>
PIK	<i>Potsdam Institute for Climate Impact Research</i>

NASA	<i>National Aeronautics &amp; Space Administration</i>
NCA	<i>National Climate Assessment</i>
NSF	<i>National Science Foundation</i>
NDRC	<i>The National Development and Reform Commission</i>
USGCRP	<i>United States Global Change Research Program</i>
USDA	<i>United States Department of Agriculture</i>
USAID	<i>U.S Agency for International Development</i>
UCS	<i>The Union of Concerned Scientists</i>
UNFCCC	<i>United Nation Framework Convention of Climate Change</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
SKLECRA	<i>State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment</i>
SMD	<i>Southern Metropolis Daily</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengamatan aktor saintifik sejak tahun 1880, tahun 2014 merupakan tahun dengan suhu rata-rata terpanas bumi.<sup>1</sup> Pada tahun 2015, 191 negara berkomitmen dalam *Paris Agreement* untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global dibawah 2<sup>0</sup>C di atas tingkat masa pra-industrialisasi dan melanjutkan upaya untuk menekan kenaikan suhu ke 1,5<sup>0</sup>C di atas tingkat pra-industrialisasi.<sup>2</sup> Peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti saintifik yang menjadi sebuah urgensi isu perubahan iklim. Sekaligus, menunjukkan terciptanya komitmen global dalam memerangi perubahan iklim dengan menahan kenaikan suhu global.

Walaupun perubahan iklim dipandang sebagai suatu isu yang mengancam keamanan global, penanganan terhadap isu perubahan iklim secara tepat ditangani dalam ranah domestik.<sup>3</sup> Secara lebih spesifik, isu yang berdampak terhadap keamanan global ini, membutuhkan penanganan dari negara-negara industri besar.<sup>4</sup> Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan kedua negara industri terbesar dan penghasil GRK terbesar di dunia. Melalui sejumlah

---

<sup>1</sup> "NASA, NOAA Find 2014 Warmest Year in Modern Record," NASA, <https://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-2014-warmest-year-in-modern-record/> (diakses bulan Juni 2022)

<sup>2</sup> "The Paris Agreement," *United Nations*, <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement> (diakses bulan September 2021)

<sup>3</sup> Barry Buzan et al., *Security: A New Framework For Analysis* (USA: Lynne Rienner, 1998), 87.

<sup>4</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 85.

aktivitas perekonomiannya, kedua tersebut dikalkulasi memproduksi 38% emisi gas rumah kaca global.<sup>5</sup> Menimbang besarnya GRK yang dihasilkan oleh kedua negara, dapat dikatakan bahwa, kesuksesan ataupun kegagalan penanganan perubahan iklim dalam skala global dipengaruhi besar oleh penanganan kedua negara tersebut.

Pada tahun 2015, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama berkomitmen untuk menurunkan 26% hingga 28% emisi gas rumah kacanya setara tingkat 2005 pada tahun 2025 serta menurunkan emisi gas rumah kacanya sejumlah 28%.<sup>6</sup> Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan *Clean Power Plan* sebagai bentuk upaya negara anggota Perjanjian Paris dalam memenuhi komitmen tersebut.<sup>7</sup> Lebih lanjut, pada tahun 2015, Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping berkomitmen untuk menurunkan 60% hingga 65% emisi gas rumah kacanya setara tingkat 2005 pada tahun 2030.<sup>8</sup> Sebagai bentuk komitmen, Tiongkok mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dirangkum dalam *National Plan on Climate Change*. Tetapi disisi lain, Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan yang dinilai oleh beberapa peneliti sebagai kebijakan yang dapat menghambat komitmen negara dalam Perjanjian Paris seperti halnya

<sup>5</sup> Kate Larsen et al. "China's Greenhouse Gas Emissions Exceeded the Developed World for the First Time in 2019," *Rhodium Group*, <https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/> (diakses bulan September 2021)

<sup>6</sup> "U.S.A First NDC Submission," *United Nations Framework Convention of Climate Change*, <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/U.S.A.%20First%20NDC%20Submission.pdf> (diakses bulan September 2021)

<sup>7</sup> "Climate Change and President Obama's Action Plan," *Obama White House*, <https://obamawhitehouse.archives.gov/president-obama-climate-action-plan> (diakses bulan September 2021)

<sup>8</sup> "China's Achievements, New Goals and New Measures for Nationally Determined Contributions," *United Nation Framework Convention of Climate Change*, <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%E2%80%99s%20Achievements,%20New%20Goals%20and%20New%20Measures%20for%20Nationally%20Determined%20Contributions.pdf> (diakses bulan September 2021)

kebijakan *Belt and Road Initiative*.<sup>9</sup> Sebagai negara industri terbesar di dunia, Tiongkok diduga mengalami kesulitan untuk menangani isu lingkungan atas dasar kepentingannya dalam ekonomi.

Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Tiongkok telah melahirkan sejumlah upaya guna menanggapi isu perubahan iklim, meskipun begitu, sejumlah peneliti menilai upaya tersebut belum cukup untuk dapat menanggulangi isu perubahan iklim. Upaya kedua negara dinilai oleh beberapa peneliti masih terbatas dan belum menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan isu.<sup>10</sup> Beberapa dari peneliti mengemukakan bagaimana isu keamanan seperti ekonomi dan militer menjadi prioritas negara. Hal ini lantas menimbulkan suatu ketidakpastian mengenai kelanjutan dari penanganan isu perubahan iklim.

Perlu diketahui bahwa isu perubahan iklim masuk dalam kategori isu keamanan lingkungan. Hal ini dikarenakan perubahan iklim dinilai dapat mengancam lingkungan, makhluk hidup, negara, dan bahkan peradaban bumi.<sup>11</sup> Adapun fenomena-fenomena yang telah bermunculan akibat isu perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu air laut, mencairnya gletser, maupun pemanasan global. WHO turut menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Jennifer Hillman, Alex Tippett, "The Climate Challenge and China's Belt and Road Initiative," *Council on Foreign Relations*, <https://www.cfr.org/blog/climate-challenge-and-chinas-belt-and-road-initiative> (diakses bulan September 2021)

<sup>10</sup> Stephen Leahy, "Most Countries Aren't Hitting 2030 Climate Goals, and Everyone Will Pay The Price," *National Geographic*, <https://www.nationalgeographic.com/science/article/nations-miss-paris-targets-climate-driven-we-at-her-events-cost-billions> (diakses bulan September 2021)

<sup>11</sup> Brian Pascus, "Human civilization faces 'existential risk' by 2050 according to new Australian climate change report," *CBS News*, <https://www.cbsnews.com/news/new-climate-change-report-human-civilization-at-risk-extinction-by-2050-new-australian-climate/> (diakses bulan September 2021)

dampak perubahan iklim telah memakan 150.000 korban jiwa per tahun.<sup>12</sup> Selain itu, fenomena cuaca ekstrim juga telah menelan biaya sejumlah 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2012.<sup>13</sup> Sedangkan bagi Tiongkok, fenomena banjir akibat perubahan iklim ditafsirkan akan menghabiskan 389 miliar dolar Amerika dalam dua dekade mendatang.<sup>14</sup>

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pada bulan Februari 2021, UNFCCC memberikan pernyataan bahwa negara anggota *Paris Agreement* perlu memperbesar upayanya dalam mereduksi laju perubahan iklim.<sup>15</sup> Tidak hanya organisasi internasional, tetapi, sejumlah peneliti turut menyuarakan kekurangan dari upaya negara dalam menanggulangi isu perubahan iklim. Seth Wynes dan Kimberly A. Nicholas berargumentasi bahwa Pemerintah Amerika Serikat cenderung menghindari opsi untuk mengeluarkan kebijakan yang memiliki dampak lebih untuk mengurangi emisi GRK (*high-impact actions*).<sup>16</sup> Disisi lain, Maria Julia Trombetta menyatakan bahwa Pemerintah Tiongkok hanya menanggapi isu perubahan iklim karena ancaman yang ada terhadap keamanan energi dan ekonomi negara saja, sehingga,

---

<sup>12</sup> "Climate Change," *World Health Organization*, <https://www.who.int/heli/risks/climate/climatechange/en/> (diakses bulan September 2021)

<sup>13</sup> "Climate Change and President Obama's Action Plan," *Obama White House*, <https://obamawhitehouse.archives.gov/president-obama-climate-action-plan> (diakses bulan September 2021)

<sup>14</sup> Stephen Chen, "Climate Change to Cost China US\$389 billion, but Impact on Trade Will Make US a Big Loser Too," *South China Morning Post*, <https://www.scmp.com/news/china/society/article/2148351/climate-change-cost-china-us389-billion-impact-trade-will-make-us> (diakses bulan September 2021)

<sup>15</sup> "Greater Climate Ambition Urged as Initial NDC Synthesis Report," *United Nations Framework Convention of Climate Change*, <https://unfccc.int/news/greater-climate-ambition-urged-as-initial-ndc-synthesis-report-is-published> (diakses bulan September 2021)

<sup>16</sup> Seth Wynes, Kimberly A. Nicholas, "The Climate Mitigation Gap: Education and Government Recommendations Miss The Most Effective Individual Solutions," *Environmental Research Letters*, Volume 12, No. 7 (2017): 5.

komitmen negara untuk menangani isu lingkungan masih terbatas.<sup>17</sup>

Berdasarkan *Global Risk Report* pada tahun 2014, fenomena cuaca ekstrem, bencana alam, hingga kegagalan dalam mengadaptasi perubahan iklim termasuk dalam daftar 10 isu dengan dampak terbesar bagi dunia.<sup>18</sup> Sedangkan, berdasarkan laporan pada tahun 2022, isu perubahan iklim menduduki peringkat satu sebagai isu dengan dampak terbesar bagi dunia.<sup>19</sup> Ancaman dan dampak signifikan dari isu perubahan iklim seharusnya menjadi alasan mengapa penanganan negara terhadap isu menjadi penting. Terlebih kepada Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yang memiliki kesempatan besar untuk merubah kondisi perubahan iklim sebagai isu global.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi bagaimana masyarakat memandang sebuah ancaman. Namun faktanya, 40% dari orang dewasa di dunia tidak memahami apa itu perubahan iklim serta ancamannya.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil survei dari *Yale Program on Climate Change Communication*, 58% dari masyarakat Amerika menganggap bahwa kemungkinan perubahan

---

<sup>17</sup> Maria Julia Trombetta, "Securitization of Climate Change in China: Implications for Global Climate Governance" *China Quarterly of International Strategic Studies*, Vol. 5, No. 1 (2019): 105.

<sup>18</sup> World Economic Forum, *Global Risks 2015: 10th edition*, (Geneva: World Economic Forum, 2015), 9, [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_Global\\_Risks\\_2015\\_Report15.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_Report15.pdf), (diakses bulan September 2021)

<sup>19</sup> World Economic Forum, *The Global Risks Report 2022: 17th edition*, 2022, (World Economic Forum, 2015), 14, [https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_The\\_Global\\_Risks\\_Report\\_2022.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf) (diakses bulan September 2021)

<sup>20</sup> Chelsea Harvey, "40 percent of adults on Earth have never heard of climate change," *Washington Post*, <https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/07/27/these-are-the-factors-that-affect-how-people-feel-about-climate-change-and-whether-they-even-know-it-exists/> (diakses bulan September 2021)

iklim dapat menyebabkan kepunahan manusia adalah dibawah 50%.<sup>21</sup> Sedangkan, berdasarkan hasil survey *Chinese Mind*, 73,7% dari masyarakat Tiongkok bersedia untuk mengeluarkan biaya lebih guna membeli produk yang ramah terhadap iklim, namun, 34% masyarakat tetap tidak mempercayai bahwa isu perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemerintah belum dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai isu perubahan iklim secara menyeluruh.

Tidak hanya itu saja, pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai telah lalai dalam menangani salah satu penyebab utama terjadinya isu perubahan iklim yaitu industri peternakan hewan.<sup>23</sup> Hal ini kemudian melahirkan dugaan bahwa pemerintah memiliki cara yang berbeda dengan aktor saintifik ketika menjalankan agenda penanggulangan isu perubahan iklim. Berdasarkan penelitian yang dimuat oleh FAO, dampak industri peternakan hewan terhadap perubahan iklim lebih besar dibanding dampak dari akumulasi sektor transportasi sedunia.<sup>24</sup> Permintaan akan produk-produk hewani juga semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia dan pendapatan manusia.<sup>25</sup> Sebagai kedua negara dengan jumlah populasi yang banyak maka meningkatnya intensitas aktivitas industri peternakan hewan di Amerika Serikat

---

<sup>21</sup> "Climate Change in the American Mind: May 2017," *Yale on Climate Change Communication*, <https://climatecommunication.yale.edu/publications/climate-change-american-mind-may-2017/> (diakses bulan September 2021)

<sup>22</sup> Binbing Wang et al., *Climate Change in the Chinese Mind Survey Report 2017*, (Beijing: Energy Foundation China, 2017) <https://www.efchina.org/Reports-en/report-comms-20171108-en>, (diakses bulan September 2021)

<sup>23</sup> Rob Bailey et al., "Livestock – Climate Change's Forgotten Sector Global Public Opinion on Meat Dairy and Consumption" *Energy, Environment, and Resources* (2014): 2.

<sup>24</sup> Henning Steinfeld et al., *Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options*, (FAO: Rome, 2006): 272.

<sup>25</sup> *Ibid*, 1-6.

dan Tiongkok seharusnya menjadi perhatian bagi negara.

Dalam konteks keamanan lingkungan, ilmuwan dan pemerintah memiliki peran besar dalam mengkonstruksikan isu perubahan iklim sebagai sebuah ancaman.<sup>26</sup> Kesepahaman ataupun pertentangan diantara kedua aktor dapat terjadi dalam proses pembentukan agenda keamanan lingkungan.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan penanganan terhadap isu perubahan iklim dalam Amerika Serikat dan Tiongkok, kedua negara menunjukkan agenda yang dibentuk belum berjalan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan pandangan antara masing-masing aktor keamanan dalam menanggulangi isu perubahan iklim. Sehingga, arah mengenai bagaimana isu perubahan iklim ini kemudian ditanggulangi dapat tersirat dalam pembentukan agenda keamanan.

Jika dapat dirangkum, maka pertama, ancaman dari isu perubahan iklim mampu mengancam masyarakat dan negara Amerika Serikat serta Tiongkok. Kedua, masyarakat Amerika Serikat dan Tiongkok belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai isu perubahan iklim.<sup>28</sup> Ketiga, terdapat tendensi bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menanggulangi isu perubahan iklim secara maksimal. Sehingga melahirkan tuntutan dari berbagai kalangan terhadap agenda pemerintah dalam menanggulangi isu perubahan iklim. Keempat, Pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan kontributor

---

<sup>26</sup> Barry Buzan et al., *Security: A New Framework For Analysis* (USA: Lynne Rienner, 1998), 75-78.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Emily Guskin, Scott Clement, Joel Achenbach, "Americans Broadly Accept Climate Science, But Many Are Fuzzy on The Details," *Washington Post*, [https://www.washingtonpost.com/science/americans-broadly-accept-climate-science-but-many-are-fuzzy-on-the-details/2019/12/08/465a9d5e-0d6a-11ea-8397-a955cd542d00\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/science/americans-broadly-accept-climate-science-but-many-are-fuzzy-on-the-details/2019/12/08/465a9d5e-0d6a-11ea-8397-a955cd542d00_story.html); (diakses bulan September 2021)

utama emisi GRK, sehingga, upaya kedua negara menjadi signifikan bagi keamanan individu dan negara. Keempat poin ini menjadi masalah sekaligus alasan mengapa agenda isu perubahan iklim di kedua negara memiliki urgensi tinggi untuk dianalisis lebih lanjut.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Terdapat tiga limitasi yang diberlakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini memiliki fokus utama untuk menganalisa agenda keamanan domestik yang dijalankan oleh masing-masing negara dalam menanggapi isu perubahan iklim. Kedua, unit analisis utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Tiongkok selaku aktor politik utama. Analisa terhadap kedua negara diperlukan untuk melihat penanganan masing-masing negara sebagai negara industri besar dan penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Dimana, kedua negara memiliki tanggung jawab serupa dalam menangani perubahan iklim. Ketiga, periode penelitian dibatasi dalam tahun 2014 hingga 2016. Tingginya suhu pada tahun 2014 memberikan urgensi bagi aktor internasional untuk menangani isu perubahan iklim. Pada tahun selanjutnya, kesepakatan global dalam *Paris Agreement* dibentuk untuk turut menjawab permasalahan tersebut. Tahun 2014 hingga tahun 2016 menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk menunjukkan respon dan komitmennya terhadap isu perubahan iklim.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan dua negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia. Ancaman dan dampak besar dari isu perubahan iklim

sebagai isu keamanan lingkungan menjadi urgensi bagi global untuk mengurangi emisi GRK. Dalam konteks keamanan lingkungan, terdapat dua agenda yang dibangun untuk mengangkat isu lingkungan ke dalam sektor keamanan yaitu agenda saintifik dan politik. Kedua agenda saling berhubungan sebagai bentuk dari tanggapan terhadap isu lingkungan yakni isu perubahan iklim.

Penelitian ini ingin menganalisa bagaimana pembentukan kedua agenda tersebut dijalankan di Amerika Serikat dan Tiongkok tepatnya pada tahun 2014 hingga 2016. Adanya rekor yang dinobatkan pada tahun 2014 sebagai tahun dengan suhu bumi terpanas. Serta, disepakatinya kesepakatan global dalam *Paris Agreement* untuk menangani perubahan iklim. Seharusnya, menjadi sebuah urgensi bagi aktor saintifik dan aktor politik untuk kemudian merespon isu perubahan iklim. Terlebih, kepada Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kedua negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia sehingga memiliki tanggung jawab khusus untuk menangani isu. Dengan begitu, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah, **“Bagaimana Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim Domestik Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2014 hingga tahun 2016?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pembentukan dan perdebatan agenda keamanan perubahan iklim di Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2014 hingga 2016. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan pembentukan dan perdebatan agenda keamanan perubahan iklim domestik yang

dijalankan oleh masing-masing negara sebagai kedua negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menggambarkan agenda keamanan perubahan iklim negara. Serta, dapat berguna dalam memahami studi keamanan non tradisional dalam sektor keamanan lingkungan khususnya terkait isu perubahan iklim.

### 1.4 Kajian Literatur

Dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis menghadirkan sejumlah pandangan dari peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur pertama merupakan karya dari Maria Julia Trombetta, beliau mengemukakan bahwa sebelum tahun 2014 Tiongkok tidak menanggapi perubahan iklim sebagai isu keamanan.<sup>29</sup> Proses sekuritisasi diawali dengan *speech act* oleh Perdana Menteri Li Keqiang dalam Kongres Rakyat Nasional untuk mendeklarasi perang melawan polusi.<sup>30</sup> Terdapat dua faktor utama pendorong dilakukannya sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim oleh Tiongkok yaitu terjadinya degradasi lingkungan dan terancamnya kebutuhan negara akan batu bara. Melalui kebijakan *New Normal*, Tiongkok mempromosikan energi terbarukan sebagai bentuk komitmen Tiongkok dalam menangani isu perubahan iklim.<sup>31</sup> Meskipun begitu, penulis menggarisbawahi keberadaan skeptisisme mengenai komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Tiongkok dalam menangani

---

<sup>29</sup> Maria Julia Trombetta, "Securitization of Climate Change in China: Implications for Global Climate Governance" *China Quarterly of International Strategic Studies*, Vol. 5, No. 1 (2019): 105.

<sup>30</sup> *Ibid*, 109.

<sup>31</sup> *Ibid*, 112.

isu perubahan iklim. Komitmen terbatas ditunjukkan melalui bagaimana hanya ancaman khusus terhadap isu perubahan iklim yang dikonstruksi oleh Pemerintah Tiongkok, yaitu, ancaman yang bersinggungan dengan ekonomi dan legitimasi negara.

Pendapat lain datang dari Eman Al-ali, Abigail Shingler, Adrienne Huston, dan Emily Leung yang menyatakan bahwa Pemerintah Tiongkok telah mengurangi emisi GRK melalui industri peternakan hewan. Pada tahun 2016, Pemerintah Tiongkok menerbitkan *dietary guidelines* untuk mengurangi konsumsi daging sebanyak 50% guna mereduksi emisi GRK dan meningkatkan kesehatan masyarakat.<sup>32</sup> Meskipun begitu, intensifikasi akan aktivitas industri peternakan hewan di Tiongkok diproyeksi akan terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan posisi Pemerintah Tiongkok saat ini adalah mendorong peningkatan produksi produk hewani. Peneliti berargumentasi bahwa kebijakan perubahan iklim Pemerintah Tiongkok saat ini didasarkan dengan pertimbangan berlebih kepada keamanan ekonomi dibandingkan lingkungan dan sosial.<sup>33</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa isu perubahan iklim saat ini belum menjadi prioritas keamanan Pemerintah Tiongkok.

Masih dalam sektor serupa, Rob Bailey, Antony Froggatt dan Laura Wellesley berargumentasi bahwa sejumlah negara melupakan sektor agrikultur peternakan hewan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya isu perubahan

---

<sup>32</sup> Eman Al-Ali et al. "Meat: The past, present, and future of meat in China's diet," (University of Waterloo, 2018), 9, [https://uwaterloo.ca/chinas-changing-food-system/sites/ca.chinas-changing-food-system/files/uploads/files/geog\\_474\\_term\\_project\\_-\\_dec2018\\_-\\_meatification\\_of\\_china.pdf](https://uwaterloo.ca/chinas-changing-food-system/sites/ca.chinas-changing-food-system/files/uploads/files/geog_474_term_project_-_dec2018_-_meatification_of_china.pdf)

<sup>33</sup> *Ibid*, 14.

iklim.<sup>34</sup> Hal ini dikarenakan pemerintah selaku aktor negara tidak melakukan kebijakan yang cukup untuk menangani hal tersebut. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesadaran yang rendah bahkan ketidaktahuan bahwa peternakan hewan merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim. Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri termasuk ke dalam daftar negara dengan jumlah hewan ternak terbanyak di dunia. Kedua negara juga dinilai memiliki kebijakan minim guna menanggulangi hal tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa target global untuk menurunkan temperatur hingga 2°C hampir mustahil tercapai tanpa adanya kebijakan untuk menangani sektor industri peternakan hewan.<sup>35</sup> Maka dari itu, peneliti mendorong adanya kebijakan yang lebih berdampak untuk mengurangi pengaruh industri peternakan hewan sebagai bentuk penanganan terhadap isu perubahan iklim.<sup>36</sup>

Lebih lanjut, Seth Wynes dan Kimberly A. Nicholas menyatakan bahwa sejumlah negara termasuk Amerika Serikat menangani isu perubahan iklim dengan kebijakan yang tidak tepat sasaran.<sup>37</sup> Dalam penelitian tersebut, penulis membagi penanganan perubahan iklim ke dalam dua tipe yaitu *high impacts* dan *low impacts*. Penanganan *high impacts* mengacu pada diet berbasis nabati, program satu anak, hidup tanpa mobil, serta menghindari perjalanan dengan pesawat. Sedangkan kebijakan *low impacts* mengacu pada aktivitas daur ulang, penggunaan transportasi umum, penggunaan produk yang memiliki efisiensi

---

<sup>34</sup> Rob Bailey et al., "Livestock – Climate Change's Forgotten Sector Global Public Opinion on Meat Dairy and Consumption" *Energy, Environment, and Resources* (2014): 2.

<sup>35</sup> Rob Bailey et al. *Op. Cit.*, 22.

<sup>36</sup> *Ibid*, 22.

<sup>37</sup> Seth Wynes, Kimberly A. Nicholas, "The Climate Mitigation Gap: Education and Government Recommendations Miss The Most Effective Individual Solutions," *Environmental Research Letters*, Volume 12, No. 7 (2017): 1-5.

energi tinggi, dan lain-lainnya.<sup>38</sup> Pemerintah Amerika Serikat memilih penanganan isu perubahan iklim dengan kebijakan yang memiliki *low impacts* dibanding *high impacts*. Penulis berargumentasi bahwa tindakan tersebut berakibat terhadap rendahnya kesadaran masyarakat akan opsi yang dimiliki untuk dapat menangani isu perubahan iklim secara lebih efektif.<sup>39</sup> Dengan kata lain, Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk tidak mengerahkan kebijakan luar biasa guna menanggulangi isu perubahan iklim.

Dalam literatur selanjutnya, Raul Kleber D. S. Boeno, Renate K. Boeno, dan Viriato Marquez menilai bahwa perubahan iklim telah dikonstruksi sebagai isu keamanan dengan bentuk ancaman militer dan non militer oleh negara-negara Barat.<sup>40</sup> Sebagai isu militer, perubahan iklim dipercayai dapat menimbulkan ataupun mengescalasi konflik dalam ranah sosial, politik, hingga ekonomi. Sebagai ancaman non militer, perubahan iklim meningkatkan intensitas sejumlah fenomena alam seperti hujan teritorial, badai, naiknya permukaan air laut, dan lain-lain.<sup>41</sup> Penulis juga menggarisbawahi bagaimana Pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan perubahan iklim sebagai isu dengan ancaman militer dan non militer sejak tahun 2015.<sup>42</sup> Dengan pemaparan tersebut, penulis kemudian menyimpulkan bahwa tindakan tersebut maka penanganan layak untuk disebut sebagai proses sekuritisasi.

Pendapat lainnya datang dari Jeroen Warner dan Ingrid Boas yang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 4-5.

<sup>40</sup> Raul Souza Boeno, Viriato Soromenho-Marques, "Climate Deterrence: Disasters and Security After COP 21," *1st International Conference on Information Technology in Disaster Risk Reduction* (2021): 128.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

menyampaikan bahwa kebijakan perubahan iklim seperti mitigasi emisi GRK yang tidak memiliki implikasi terhadap perekonomian maka tidak dapat dimaknai sebagai *extraordinary measures*.<sup>43</sup> Betul adanya bahwa beberapa pemerintah negara telah melakukan *speech act* sebagai upaya untuk memperkenalkan isu kepada publik. Namun, tanpa adanya penerimaan dari publik dan *extraordinary measures* maka isu belum tergolong sebagai *existential threat*. Peneliti juga mempermasalahkan bagaimana konstruksi isu sebagai sebuah bencana atau krisis dapat berujung pada kebijakan *aversive* seperti halnya penggunaan militer untuk menangani konflik migrasi akibat isu perubahan iklim. Sekuritisasi perubahan iklim yang tidak tepat akhirnya berujung pada terhindarkannya praktik manajemen isu, seperti halnya, minim upaya negara untuk mengurangi emisi karbon dioksida.<sup>44</sup> Sehingga, konstruksi isu tidak berujung pada sekuritisasi yang berhasil atau penanganan isu yang sesungguhnya. Peneliti mengutip pernyataan Buzan bahwa proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil atau sukses ketika isu keamanan disampaikan kepada publik dan ditangani dengan *priority action*.<sup>45</sup>

Menurut penulis, literatur yang telah dibahas memperkuat dugaan bahwa terdapat perdebatan dalam agenda keamanan isu perubahan iklim Amerika Serikat dan Tiongkok. Beberapa literatur menunjukkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok telah melakukan sekuritisasi sehingga menempatkan perubahan iklim sebagai isu keamanan. Namun, terdapat juga

---

<sup>43</sup> Jeroen Warner, Ingrid Boas, "Securitisation of Climate Change: The Risk of Exaggeration" *Ambiente & Sociedade* Vol. 20, Issue 3 (2017): 215.

<sup>44</sup> Chris Methmann, Delf Rothe "Politics for the day after tomorrow: The logic of apocalypse in global climate politics," *Security Dialogue* 43(4) (2012): 337.

<sup>45</sup> Barry Buzan et al., *Security: A New Framework For Analysis* (USA: Lynne Rienner, 1998), 26.

pandangan lainnya yang mengatakan bagaimana tindakan pemerintah tidak sejalan dengan *speech act* yang dilakukan sehingga berujung pada kegagalan sekuritisasi. Lebih lanjut, pertentangan antara aktor saintifik dengan pemerintah juga terlihat melalui bagaimana sejumlah peneliti seperti Rob Bailey berargumentasi bahwa pemerintah tidak menangani isu perubahan iklim secara menyeluruh. Seperti halnya bagaimana Pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menangani salah satu sektor penyebab isu perubahan iklim yaitu industri peternakan hewan secara signifikan. Merujuk kepada pernyataan Buzan bahwa ketika isu belum dikonstruksikan dan diupayakan sebagai *primary security*, maka tanggapan tersebut belum dapat dimaknai sebagai proses sekuritisasi.

Tidak hanya bahwa literatur-literatur yang telah dikaji menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang berbeda mengenai bagaimana agenda keamanan terkait isu perubahan iklim dijalankan oleh aktor keamanan. Namun, literatur-literatur yang ada belum mengkaji tanggapan masing-masing aktor secara menyeluruh. Isu perubahan iklim merupakan isu keamanan non tradisional yang terbentuk dari berbagai macam penyebab. Maka dari itu, analisa secara menyeluruh lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana perdebatan antara dua agenda utama terkait isu perubahan iklim berjalan di Amerika Serikat dan Tiongkok.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dengan menganalisis topik penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep keamanan lingkungan menurut Mazhab Kopenhagen. Pemahaman utama

mengenai keamanan lingkungan akan diambil dari karya Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde dalam buku yang diterbitkan dengan judul *A New Framework For Analysis* pada tahun 1998. Dalam buku tersebut, Mazhab mengulas lima sektor keamanan yaitu politik, militer, ekonomi, masyarakat, serta lingkungan.<sup>46</sup> Ketika melihat masing-masing sektor keamanan lingkungan, Mazhab Kopenhagen menganalisisnya melalui empat poin utama yaitu *security agenda*, *referent object*, *security actor*, dan *logic of threats and vulnerabilities*.<sup>47</sup>

Barry Buzan berargumentasi bahwa *environmental security* merujuk pada pemeliharaan biosfer lokal dan biosfer planet sebagai sistem penting dalam mendukung aktivitas manusia.<sup>48</sup> Sebuah moto menjelaskan bagaimana sektor keamanan lingkungan dapat dipahami yaitu, '*think globally, act locally*'.<sup>49</sup> Beberapa isu dalam keamanan lingkungan memberikan dampak terhadap global, meskipun begitu, penanganan biasanya membutuhkan aspek-aspek dalam ranah domestik negara. Mazhab Kopenhagen meyakini adanya dua agenda dalam sektor keamanan lingkungan yaitu *scientific agenda* dan *political agenda*. Agenda saintifik umumnya dijalankan oleh ilmuwan dan lembaga penelitian dengan menyajikan sejumlah daftar masalah lingkungan yang sedang berlangsung ataupun berpotensi menghambat peradaban. Sedangkan, agenda politik umumnya dijalankan oleh pemerintah dengan melaksanakan proses pengambilan keputusan publik dan kebijakan publik untuk merespon masalah lingkungan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 1-20.

<sup>47</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 19

<sup>48</sup> Barry Buzan, *People, State, and Fear: A Agenda For International Security Studies In The Post Cold Era*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), 19-20.

<sup>49</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 87.

<sup>50</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 72.

*Ultimately, the scientific agenda underpins securitizing moves, whereas the political agenda is about three areas: (1) state and public awareness of issues on the scientific agenda (how much of the scientific agenda is recognized by policymakers, their electorates, and their intermediaries--the press); (2) the acceptance of political responsibility for dealing with these issues; and (3) the political management questions that arises: problems of international cooperation and institutionalization--in particular regime formation, the effectiveness of unilateral national initiatives, ... problems of enforcement, and so forth (Barry Buzan et al., 1998, 72).*

Pada umumnya, agenda saintifik mendukung gerakan sekuritisasi terhadap isu lingkungan, sementara, agenda politik memiliki tiga bidang kerja: (1) kesadaran negara dan publik terkait isu yang diangkat dalam agenda saintifik; (2) penerimaan tanggung jawab politik untuk menangani isu terkait; dan (3) pengelolaan pertanyaan-pertanyaan politik yang lahir: masalah-masalah dalam kerja sama internasional dan institusionalisasi--khususnya pembentukan rezim, efektivitas inisiatif unilateral di level nasional, ... masalah penegakan (rezim), dan lainnya (Barry Buzan et al., 1998, 72)

Adanya ketidaksepakatan antar agenda aktor dapat terjadi mengenai bagaimana isu perlu ditangani entah dalam bentuk sekuritisasi, desekuritisasi, politisasi, maupun depolitisasi.<sup>51</sup> Sekuritisasi adalah proses dimana aktor sekuritisasi (*securitizing actors*) melakukan pernyataan (*speech act*) kepada publik (*target audience*) agar menjadi tanggap (*alert*) bahwa objek yang dituju (*referent object*) diyakini berpotensi mendatangkan bencana yang mengancam keamanan sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian secara darurat (*emergency response*) di luar kebijakan normal.<sup>52</sup> Terdapat tiga komponen yang digunakan untuk menilai jika proses sekuritisasi termasuk berhasil yaitu, *existential threats*, *emergency action* (perjanjian rahasia, pemungutan pajak, memlimitasi *inviolable rights*, dan lain-lain) dan *effects on interunit relations by breaking free of rules*.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 74.

<sup>52</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*, (Indonesia: Yayasan Obor, 2017), 179.

<sup>53</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 26.

*Speech act* dapat dikategorisasi sebagai tahapan ketika aktor mengkonstruksikan isu sebagai isu yang berkaitan dengan *survival* dan merupakan prioritas. Sekuritisasi tidak berhasil jika publik tidak menerima isu sebagaimana dikonstruksikan oleh aktor.

Sekuritisasi merupakan versi ekstrim politisasi, dimana politisasi berarti bahwa isu ditangani dalam ranah kebijakan publik normal sehingga tidak membutuhkan *extraordinary measures*. Sedangkan, depolitisasi merupakan penanganan oleh negara dengan memutuskan untuk tidak menghadapi isu ataupun menghadirkan isu dalam diskusi publik.<sup>54</sup> Kebalikan dari sekuritisasi, desekuritisasi adalah proses untuk mengembalikan isu yang berada pada tahap darurat kembali pada bidang politik normal.<sup>55</sup> Terdapat dua strategi dalam melakukan desekuritisasi yaitu dengan memlimitasi penggunaan *speech act* terhadap isu tertentu dan melakukan *speech act failure*.<sup>56</sup>

Mazhab Kopenhagen berargumentasi bahwa sekuritisasi dan desekuritisasi dapat dijadikan sebagai bentuk penanganan terhadap isu. Meskipun begitu, Ole Waever menyatakan bahwa desekuritisasi merupakan pilihan yang lebih ideal dibanding sekuritisasi, hal ini dikarenakan, desekuritisasi mencegah suatu isu terbuka dalam perdebatan.<sup>57</sup> Disisi lain, pilihan untuk melakukan desekuritisasi mampu membuat suatu isu dilupakan sebagai suatu isu yang penting untuk diperhatikan dan jaminan akan diselesaikannya isu tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 23.

<sup>55</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 4.

<sup>56</sup> Ole Waever, "Securitization and Desecuritization," dalam *On Security* oleh Ronnie D. Lipschutz, (New York: Columbia University Press, 1995), 7-9.

<sup>57</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 29.

<sup>58</sup> Lene Hansen, "Reconstructing desecuritization: the normative-political in the Copenhagen School and directions for how to apply it," *Review of International Studies* Volume 38, Issue 03 (2011): 544.

Poin selanjutnya, *referent object*, mengacu pada suatu objek yang kini menghadapi ancaman dari sektor berkaitan. Dalam menganalisis sektor lingkungan, Mazhab Kopenhagen meyakini bahwa *referent object* pada sektor ini adalah lingkungan itu sendiri dan hubungan antara peradaban dengan lingkungan (*human enterprise*).<sup>59</sup> Mazhab Kopenhagen berargumentasi bahwa satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat global sebagai *referent object* dari ancaman lingkungan adalah dengan merubah masyarakat global.<sup>60</sup> Perlu ditekankan bahwa peradaban manusia tidak hanya saja menjadi korban dari bencana lingkungan yang terjadi. Namun, peradaban manusia juga merupakan akar penyebab dari terjadinya bencana lingkungan tersebut.<sup>61</sup>

Kemudian, *security actor*, yaitu aktor yang dapat bertindak dalam melindungi objek dari ancaman maupun bertindak dengan mengabaikan upaya untuk memprioritaskan suatu ancaman. *Lead actor* dalam sektor lingkungan ini mungkin adalah negara, perusahaan, maupun organisasi non-pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi untuk bertindak secara efektif dalam menangani isu. Negara memiliki kedaulatan dan karenanya merupakan *lead actor* dalam isu keamanan lingkungan. Terdapat juga *veto actor* yang memiliki langkah oposisi dengan *lead actor* dengan berusaha mengecilkan atau meremehkan isu-isu lingkungan. Sedangkan, organisasi non-pemerintahan yang berfokus terhadap masalah lingkungan dapat menjadi *lead actor* karena kemampuannya dalam melakukan *unilateral action*. *Unilateral action* tersebut dapat dilakukan dalam bentuk diplomasi, menginformasikan opini publik, ataupun melakukan penelitian

---

<sup>59</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 70-76.

<sup>60</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 76.

<sup>61</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 76-77.

untuk menggerakkan isu lingkungan pada agenda organisasi internasional (*mobilizing the scientific agenda*).<sup>62</sup>

Terakhir, *logic of threats and vulnerabilities* mengacu pada kemungkinan ancaman dan kerentanan secara keseluruhan yang terjadi akibat isu dalam sektor lingkungan. Terdapat tiga kerangka logika yang dapat mendefinisikan hubungan antara ancaman dengan keamanan lingkungan. Pertama, ancaman terhadap peradaban manusia karena lingkungan alam yang tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Kedua, ancaman terhadap eksistensi manusia atau peradaban manusia karena aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan alam. Salah satu contoh dari hubungan kedua ini adalah pengaruh dari emisi GRK terhadap penipisan lapisan ozon. Ketiga, ancaman terhadap lingkungan alam dari aktivitas manusia yang bukan berupa ancaman terhadap peradaban atau eksistensi manusia. Contohnya, menipisnya berbagai sumber daya mineral yang dapat ditangani dengan perkembangan teknologi.<sup>63</sup>

Mazhab Kopenhagen menggarisbawahi kerangka logika kedua ketika hubungan sirkular antara peradaban dan lingkungan. Dimana, peradaban manusia menyebabkan sejumlah perubahan pada kondisi lingkungan. Namun disisi lain, kondisi lingkungan dengan sejumlah bencananya mampu mengancam peradaban manusia itu sendiri. Hubungan sirkular ini diyakini terjadi akibat peningkatan populasi manusia dan peningkatan aktivitas ekonomi di abad ke-20.<sup>64</sup> Sehingga, diyakini bahwa untuk menghadapi ancaman dari sektor lingkungan dibutuhkan

---

<sup>62</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 77-79.

<sup>63</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 79-80.

<sup>64</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 80.

solusi yang melibatkan perubahan dalam peradaban manusia.<sup>65</sup>

## **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi analisis naratif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan penulis yaitu untuk memaknai bagaimana penanganan unit analisis utama terkait isu perubahan iklim. Dimana penulis akan berfokus pada deskripsi dan interpretasi data.<sup>66</sup> Lebih lanjut, strategi analisis naratif yang dimaksud oleh penulis diadopsi menurut penjelasan Lawrence Neuman.<sup>67</sup> Strategi naratif menganalisa kejadian dengan menggambarkan suatu proses dengan menghubungkan antar konteks yang kompleks sesuai dengan teknik yang digunakan oleh penulis.<sup>68</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative documents* dan *qualitative audio and visual materials*.<sup>69</sup> Dengan penggabungan kedua teknik tersebut maka jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada dokumentasi lisan dan tulisan resmi seperti pidato dan wawancara. Sedangkan, data sekunder merujuk pada buku, jurnal, artikel, dan berita.

---

<sup>65</sup> Barry Buzan et al., *Op. Cit.*, 76.

<sup>66</sup> Beverley Hancock et al., *An Introduction to Qualitative Research* (Leicester: The NIHR RDS EM, 2007): 6.

<sup>67</sup> Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th Edition, (USA: Pearson, 2014): 494-495.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> John W. Creswell, *Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*, (SAGE: USA, 2014): 610.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab.

**Bab I “Pendahuluan”**, pada bab ini penulis memaparkan tentang pendahuluan penelitian yang terbagi menjadi tujuh sub-bagian. Sub-bagian tersebut diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan.

**Bab II “Perubahan Iklim sebagai Ancaman Eksistensial”**, pada bab ini penulis bertujuan untuk menggambarkan dampak dan ancaman apa yang diberikan oleh perubahan iklim terhadap Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan data mengenai kondisi dan dampak perubahan iklim di Amerika Serikat. Sub bab ketiga juga akan memaparkan data mengenai kondisi dan dampak perubahan iklim di Tiongkok. Dalam, sub bab kedua dan keempat peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang disajikan pada sub bab pertama dan ketiga. Dalam kedua sub bab tersebut, penulis dapat menggambarkan jika perubahan iklim tergolong sebagai ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat dan Tiongkok.

**Bab III “Pembentukan Agenda Keamanan Perubahan Iklim Amerika Serikat dan Tiongkok”**, pada bab ini penulis akan memaparkan data mengenai langkah-langkah aktor saintifik dan aktor politik dalam menanggapi isu perubahan iklim di Amerika Serikat dan Tiongkok. Serta, menganalisa langkah-langkah tersebut menggunakan konsep agenda keamanan oleh Mazhab

Kopenhagen. Masing-masing sub bab akan dibagi menjadi tiga sub sub bab. Sub bab pertama akan menggambarkan pembentukan agenda saintifik perubahan iklim negara. Sub bab kedua akan menggambarkan pembentukan agenda politik perubahan iklim negara. Sub bab ketiga akan menggambarkan perdebatan dalam agenda keamanan perubahan iklim negara.

**Bab IV “Penutup”**, bab ini berisi penutupan penelitian dengan sebuah kesimpulan berupa pemaknaan terhadap perdebatan agenda keamanan perubahan iklim di kedua negara. Penulis juga hendak menghadirkan perspektifnya kembali berupa pendapat dalam agenda keamanan perubahan iklim di kedua negara.